

**PERKEMBANGAN DAN PENGARUH DANA FREIBANK TERHADAP  
PEMBANGUNAN REGIONAL JAWA TIMUR**

©. 163/81  
Ind  
p

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memperlengkapi Syarat-Syarat dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan**

Oleh :

**Ny. INDRAWATI**

**No. Pokok : 2876/PE.**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**1981**

Surabaya, *13 Agustus 1981*  
.....

**Disetujui dan diterima baik  
oleh :**

**Dosen Pembimbing:**

*Santika*

**( Dr. Ko. Santika I.B.M. )**

**Ketua Jurusan:**

*Ismaelnoerawan*

**( Irs. Ko. Ismaelnoerawan )**



**Kupersembahkan kepada :  
Ayah dan Ibu, Kakak dan  
Adik-adikku serta Suami  
dan anak-anakku yang  
tercinta.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya selesailah skripsi ini yang diberi judul : **Perkembangan Dan Pengaruh Dana Perbankan Terhadap Pembangunan Regional Jawa Timur.**

Skripsi ini diajukan untuk memperlengkapi Syarat-syarat menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Mengingat terbatasnya kemampuan penyusun, data, waktu serta literatur, pembahasan dalam skripsi ini amat sederhana. Namun demikian dengan bantuan semua pihak, telah diusahakan beberapa uraian yang sekiranya dapat dijadikan bahan untuk mengetahui masalah dana perbankan.

Pada kesempatan ini pula penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs.Ec. I.B.M. Santika, sebagai dosen pembimbing.
2. Bapak Drs.Ec. Putut, Kepala Bidang Data Departemen Perdagangan Jawa Timur beserta staf.
3. Bapak Direktur Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur beserta staf.
4. Bapak Ketua BAPPEDA Daerah Tingkat I Jawa Timur, Bapak Kepala Bagian Ferekonomian beserta staf, Bapak Kepala Bagian Perpustakaan beserta staf, Bapak Se -

ekretaris pada Kantor BAPPEDA Daerah Tingkat I Jawa Timur.

5. Bapak Drs. Soedjalmo, Kepala Biro Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
6. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, khususnya Dosen Jurusan Studi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya dengan tulus dan kesungguhan hati.
7. Ibunda dan Ayahanda serta kakak yang tercinta yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Suami serta ananda tercinta yang dengan penuh pengertian memberikan bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini selesai.
9. Teman-teman yang telah memberikan kritik-kritik dan saran-sarannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan Rahmat-Nya serta membalas budi baiknya.

Surabaya,

Penyusun.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
 <b>B A B</b>	
<b>I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1. Pendangan Umum .....	1
2. Penjelasan Judul .....	5
3. Alasan Pemilihan Judul .....	7
4. Tujuan Penyusunan .....	8
5. Sistematika Skripsi .....	9
6. Metodologi .....	10
6.1. Permasalahan .....	10
6.2. Hipotesa Kerja .....	10
6.3. Scope Analisa .....	11
6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	12
<b>II. Sumber Dana Perbankan dan Kebijakannasan Perbankan .....</b>	<b>14</b>
1. Sumber-Sumber Dana Perbankan .....	14
2. Kebijakannasan Perbankan Untuk Meningkatkan Sumber Dana .....	21
<b>III. Sumber Dana dan Investasi Pembangunan Regional Jawa Timur .....</b>	<b>31</b>
1. Sumber Dana Pembangunan Regional di Jawa Timur .....	31
2. Investasi Pembangunan di Jawa Timur .....	38

B A B	Halaman
3. Alokasi Dana Perbankan di Jawa Timur .....	49
IV. Perkembangan dan Pengaruh Dana Perbankan Terhadap Pembangunan Regional Jawa Timur .....	56
1. Perkembangan Dana Perbankan di Jawa Timur ..	56
2. Peranan Dana Perbankan Terhadap Penghimpunan Dana Pembangunan Regional Jawa Timur .....	64
3. Peranan Realisasi Kredit Perbankan Terhadap Pembangunan Regional Jawa Timur .....	67
V. Kesimpulan dan Saran .....	70
1. Kesimpulan .....	70
2. Saran .....	72
Daftar Buku.	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Perkembangan Dana Pembangunan di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Selama Tahun 1974/ - 1975 sampai dengan Tahun 1978/1979 (Dalam Milyar Rupiah) .....	32
2. Perkembangan Posisi Dana Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Selama Tahun 1974/1975 sampai dengan Tahun 1978/1979 (Dinyatakan dalam Persen) .....	36
3. Investasi Pembangunan Jawa Timur PELITA I (Dalam Ribuan Rupiah) .....	39
4. Investasi Pembangunan Jawa Timur PELITA II (Dalam Ribuan Rupiah) .....	40
5. Perkembangan GRDP dan Pertambahan Investasi Propinsi Jawa Timur yang Diperlukan Dalam PELITA III 1979/80 - 1983/84 Atas Dasar Harga Konstan 1978 (Dalam Milyar Rupiah) .....	45
6. Perkembangan Kredit Perbankan di Jawa Timur Selama PELITA II .....	50
7. Perkembangan Alokasi Kredit Perbankan di Jawa Timur Selama PELITA II (Dinyatakan dalam Persen)..	52
8. Perkembangan Ekspor Jawa Timur Tahun 1974/75 - 1978/79 (Dalam US \$) .....	53
9. Perkembangan Dana Perbankan di Jawa Timur Tahun 1974/75-1978/79 (Dalam Jutaan Rupiah) .....	57
10. Perkembangan Posisi Dana Perbankan di Jawa Timur Tahun 1974/75-1978/79 (Dalam Persen) .....	60
11. Perkembangan Tingkat Bunga Deposito Berjangka Tahun 1973-1978 .....	62
12. Peranan Dana Perbankan Terhadap Dana Pembangunan Di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Menurut Sumber Dana Perbankan Tahun 1974/1975 sampai dengan Tahun 1978/1979 (Dalam Jutaan Rupiah, Persentase merupakan perbandingan antara Sumber Dana Pembangunan dengan Dana Perbankan) ....	65



Nomor

Halaman

13. Perimbangan Antara Investasi Pembangunan Regional dengan Realisasi Kredit Perbankan di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1974/1975 sampai dengan 1978/1979 (Dalam Jutaan Rupiah) ..... 68



## B A B I

## P E N D A H U L U A N

1. Pandangan Umum

Dalam REPELITA II telah dirumuskan pokok-pokok kebijaksanaan moneter yaitu : kebijaksanaan mobilisasi tabungan; kebijaksanaan suku bunga dan perkreditan; program bantuan kredit dan lain-lain; bantuan keuangan untuk golongan ekonomi lemah; peningkatan efisiensi lembaga keuangan.

Langkah-langkah kebijaksanaan moneter tersebut di atas diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan.
- (2) Memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.
- (3) Memunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi.
- (4) Memunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah.
- (5) Meningkatkan efisiensi kerja dan peranan lembaga-lembaga keuangan. 1

Lima pokok sasaran kebijaksanaan moneter dalam REPELITA II tersebut di atas sebenarnya merupakan rangkaian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Untuk memperluas

---

<sup>1</sup>Departemen Penerangan RI, Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75 - 1978/79, Departemen Penerangan R.I., Jakarta, 1974, Buku I, halaman 248.

kesempatan kerja harus ditempuh dengan menambah jumlah investasi. Penambahan investasi akan dapat ditempuh dengan jalan meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan.

Selanjutnya diharapkan agar di dalam pola kebijaksanaan mobilisasi tabungan masyarakat tersebut lebih banyak diarahkan agar dapat memunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah. Dengan perkataan lain dicegah agar alokasi dana pembangunan yang dihimpun dari masyarakat ini tidak mengarah lebih banyak kepada golongan ekonomi kuat. Bilamana pola kebijaksanaan ini dapat dilaksanakan dengan sempurna maka arahnya akan memuju pada pemerataan pendapatan dari golongan ekonomi kuat kepada golongan ekonomi lemah.

Berdasarkan pengertian umum, tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Maka pengumpulan dana pembangunan melalui kebijaksanaan mobilisasi tabungan ini sebenarnya merupakan langkah kebijaksanaan yang diarahkan untuk pemerataan pendapatan. Tabungan yang dihimpun dari golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan ini, kemudian disalurkan untuk pembiayaan investasi, yang akan dapat menampung para pencari kerja. Karena para pencari kerja adalah golongan masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan, sedangkan para penabung adalah golongan masyarakat yang mempunyai pendapatan, maka dalam pola tersebut akan terlukis pemerataan pendapatan masyarakat dari

golongan yang memiliki pendapatan kepada golongan masyarakat yang tidak memiliki pendapatan.

Lembaga-lembaga Keuangan yang kurang terorganisir akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, baik terhadap mereka yang ingin menabung maupun bagi mereka yang membutuhkan dana untuk membiayai investasinya. Penghimpunan tabungan masyarakat akan menghadapi halangan dan akibatnya pembiayaan investasi akan menjadi mahal dan sukar. Untuk menghindarkan masalah tersebut di atas dapat ditempuh dengan jalan meningkatkan efisiensi kerja dan peranan lembaga-lembaga keuangan.

Secara umum peranan kebijaksanaan moneter dapat disebutkan bahwa di satu pihak akan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan di lain pihak akan dapat mempertahankan kestabilan ekonomi. Kedua peranan tersebut di atas dirintis melalui mobilisasi tabungan dengan pengertian bahwa :

Tabungan masyarakat oleh karenanya harus ditingkatkan dengan pesat dalam Repelita II. Di samping itu maka tabungan tersebut semakin banyak disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terorganisir dalam bentuk simpanan giro, tabungan dalam bank, deposito berjangka, penyertaan modal dengan pembelian saham, polis asuransi dan sebagainya. Mobilisasi tabungan melalui lembaga-lembaga keuangan ini sangat penting artinya dalam memberi kesempatan kepada para pengusaha untuk mendapatkan modal tambahan di samping modal sendiri untuk membiayai kebutuhan mereka. <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, halaman 249.

Menurut kutipan tersebut di atas pelaksanaan pembangunan ekonomi akan dapat mencapai tingkat laju pertumbuhan yang semakin cepat bilamana pemupukan dana pembangunan yang berupa tabungan masyarakat dapat ditingkatkan.

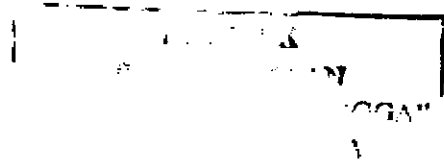
Khususnya untuk menjelang Repelita III sumber non pemerintah diharapkan akan dapat dihimpun "sebanyak Rp.21.246 milyar selama Repelita III. Sedangkan seluruh kebutuhan dana selama Repelita III akan meliputi jumlah sebanyak Rp.42.835 milyar".<sup>3</sup> Dengan demikian berarti bahwa peranan sumber non pemerintah terhadap pembangunan ekonomi diharapkan dapat mencapai tingkat sebesar 49,6% dari seluruh kebutuhan dana pembangunan.

Untuk Jawa Timur dalam REPELITA III kegiatan pembangunan ekonomi akan membutuhkan pembiayaan "sebanyak Rp.3.331,71 milyar. Kebutuhan dana pembangunan tersebut diharapkan akan dapat digali dari sumber Pemerintah sebanyak Rp.1.332,68 milyar, dan sisanya sebanyak Rp.1.999,03 milyar akan dapat digali dari sumber Swasta/non pemerintah".<sup>4</sup> Tepatnya sektor non pemerintah akan memiliki peranan "sebesar 60%"<sup>5</sup> di dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Peran-

<sup>3</sup>Departemen Penerangan RI, Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80-1983/84, Departemen Penerangan R.I., Jakarta, Buku I, halaman 2-20 (t.th).

<sup>4</sup>Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, 1979/80-1983/84, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya, 1980, Buku I, halaman 7-4.

<sup>5</sup>Ibid, halaman 7-4.



an sebesar 60% tersebut diharapkan sektor non pemerintah dapat melaksanakannya, apabila dari pihak Perbankan meletakkan dasar-dasar kebijaksanaannya untuk dapat memobilisasikan dana tabungan masyarakat di Jawa Timur.

## 2. Penjelasan Judul

Yang dimaksud penulis dengan kata "PERKEMBANGAN" adalah meliputi 2 (dua) pengertian yaitu :

- perkembangan secara kuantitatif dan
- perkembangan secara kualitatif.

Dalam pengertian perkembangan secara kuantitatif akan diberikan gambaran tentang seluruh jumlah dana perbankan yang dihimpun dari masyarakat. Dan perkembangannya akan dapat diperhatikan dengan jalan membandingkan jumlahnya dari tahun ke tahun.

Perkembangan secara kualitatif adalah suatu gambaran yang memberikan penganalisaan tentang sumber-sumber manakah dana yang bersangkutan dapat digali. Berdasarkan penelitian penulis pada Lembaga Perbankan, ternyata sumber-dana yang bersangkutan digali dari 3 (tiga) sumber yaitu :

- giro
- deposito
- tabungan.

Dengan demikian berarti bahwa perkembangan secara kualitatif seperti tersebut di atas, akan memperlihatkan jumlah -

masing-masing sumber dana dengan memberikan analisa studi-perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan kata "PENGARUH" adalah gambaran yang menunjukkan akibat yang ditimbulkan dana perbankan terhadap pembangunan ekonomi. Penganalisaannya akan ditekankan pada permasalahan sampai seberapa jauh peranan dana yang disimpan oleh pihak Lembaga Perbankan terhadap dana pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pengertian "DANA PERBANKAN" adalah dana-dana yang dipercayakan untuk disimpan di bank, baik bank-bank swasta maupun bank pemerintah secara bersama-sama yang berada di wilayah Jawa Timur, yang terdiri dari :

1. Giro
2. Deposito
3. Tabungan.

Adapun yang dimaksudkan dengan kata "PEMBANGUNAN" - pada skripsi ini adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan proses di sini adalah pelaksanaan kegiatan yang menghendaki adanya kenaikan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi.

Investasi akan dapat ditingkatkan bilamana dapat diusahakan penambahan faktor-faktor produksi, di mana salah satu dari-

pada faktor produksi itu adalah modal atau secara umum disebut dana pembangunan.

Pengertian "REGIONAL" adalah wilayah. Namun pengertian wilayah tersebut bukanlah suatu ruang lingkup daerah yang menunjukkan suatu "economic region" akan tetapi memperlihatkan suatu perwilayahan pemerintah secara administratif yaitu ruang lingkup Propinsi Daerah Tingkat I dan daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah "Jawa Timur".

Sehingga secara menyeluruh judul skripsi ini dapat ditulis dengan : "Perkembangan Dan Pengaruh Dana Perbankan Terhadap Pembangunan Regional Jawa Timur".

Dengan judul tersebut dimaksudkan perkembangan dana perbankan secara kuantitatif dan kualitatif dan akibat yang ditimbulkannya terhadap dana pembangunan dan investasi pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur selama periode Pelita II.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

1. Pada pandangan umum dimuka telah dikemukakan bahwa pada Repelita III peranan sektor non pemerintah diharapkan akan mencapai tingkat 60% dari seluruh kebutuhan dana pembangunan ekonomi di Jawa Timur.
2. Di dalam masalah penghimpunan dana pembangunan tersebut pada hakikatnya sektor non pemerintah masih banyak menggantungkan pada pihak Lembaga Perbankan.



3. Pihak Lembaga Perbankan sendiri tidak akan mampu untuk memenuhi seluruh jumlah kebutuhan dana pembangunan yang dimaksud dari dana yang dimiliki sendiri tanpa melakukan penggaliannya dari pihak masyarakat.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas penulis tertarik untuk mengupas masalah dana perbankan yang dikaitkan dengan pembangunan ekonomi di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

#### 4. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai dana perbankan yang dihimpun baik oleh Bank Pemerintah maupun Bank Swasta secara keseluruhan dan dana pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan dana perbankan yang dihimpun baik oleh Bank Pemerintah maupun Bank Swasta secara keseluruhan terhadap dana pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan realisasi kredit/investasi perbankan terhadap investasi pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
4. Memberikan sumbangan pemikiran penulis kepada pihak Lembaga Perbankan di dalam penghimpunan dana asal dari masyarakat.

## 5. Sistimatika Skripsi

Sistimatika skripsi yang berjudul : **Perkembangan Dan Pengaruh Dana Perbankan Terhadap Pembangunan Regional Jawa Timur** ini adalah sebagai berikut :

### Bab I : Pendahuluan.

Di dalam pendahuluan diuraikan mengenai pandangan umum, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penyusunan, sistimatika skripsi, metodologi yang meliputi : permasalahan, hipotesa kerja, scope analisa dan prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

### Bab II : Sumber Dana Perbankan dan Kebijakan Perbankan.

Pada bab ini diuraikan tentang, sumber-sumber dana perbankan serta kebijakan perbankan untuk meningkatkan sumber dana.

### Bab III : Sumber Dana dan Investasi Pembangunan Regional Jawa Timur.

Bagian ini merupakan gambaran dari perkembangan sumber dana pembangunan regional di Jawa Timur, Perkembangan Investasi pembangunan regional di Jawa Timur serta alokasi kredit perbankan di Jawa Timur.

### Bab IV : Perkembangan dan Pengaruh Dana Perbankan terhadap



Pembangunan Regional Jawa Timur.

Dalam bab ini diuraikan perkembangan dana perbankan di Jawa Timur, peranan dana perbankan terhadap penghimpunan dana pembangunan regional di Jawa Timur, serta peranan realisasi kredit perbankan terhadap investasi pembangunan regional Jawa Timur.

**Bab V. : Kesimpulan dan Saran.**

Sistematika skripsi ini diakhiri dengan menyampaikan kesimpulan dan saran penulis tentang perkembangan dan pengaruh dana perbankan terhadap pembangunan regional Jawa Timur.

## **6. Metodologi**

### **6.1. Permasalahan.**

Dalam rangka pembangunan nasional sangat dibutuhkan dana yang besar agar pembangunan dapat berjalan secara lancar. Khusus Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur selama PERLITA II, dana pembangunan yang dihimpun oleh Lembaga Perbankan peranannya mengalami penurunan di dalam menunjang pembangunan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

### **6.2. Hipotesa kerja.**

Dari permasalahan tersebut di atas dapat disusun hipotesa kerja, sebagai berikut :

Dana pembangunan yang dihimpun oleh pihak Lembaga Perbankan

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perannya dapat lebih besar apabila pihak Lembaga Perbankan dapat lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat, antara lain melalui :

1. Memberikan tingkat bunga yang menarik. Artinya disesuaikan dengan tingkat perkembangan harga sejauh masih menguntungkan nasabah.
2. Memberikan insentive berupa hadiah-hadiah bagi dana yang mencapai jumlah tertentu.
3. Kemungkinan pengembangan deposito berjangka lebih dari 6 bulan.
4. Kemudahan mendapatkan rekening giro.
5. Kelunakan pemberian kredit bagi penabung yang telah mempunyai dana pada Lembaga Perbankan untuk kepentingan pembangunan.

### 6.3. Scope Analisa.

1. Secara geografis skripsi ini dibatasi pada wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
2. Secara materi pembahasannya dibatasi pada masalah perkembangan dana perbankan yaitu giro, deposito dan tabungan yang dihimpen oleh pihak perbankan baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta secara keseluruhan.
3. Pengemaliannya dibatasi pada peranan dana perbankan tersebut di atas terhadap penghimpunan dana pes-

**bangunan dan investasi pembangunan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.**

#### **6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.**

##### **6.4.1. Pengumpulan data.**

Pengumpulan data yang diperlukan untuk pembahasan skripsi ini diperoleh dengan :

###### **a. Studi kepustakaan.**

Dengan studi kepustakaan didapat bahan-bahan yang bersifat teori, khususnya di bidang perbankan yang berasal dari literatur, majalah-majalah.

###### **b. Penelitian lapangan.**

Penelitian lapangan didapatkan dengan survei langsung ke instansi-instansi yang bersangkutan dengan perbankan, pembangunan ekonomi regional Jawa Timur dalam hal ini :

- 1. Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, di Surabaya.**
- 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.**
- 3. Departemen Perdagangan Surabaya.**
- 4. Biro Keuangan Daerah Tingkat I Jawa Timur.**

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara :

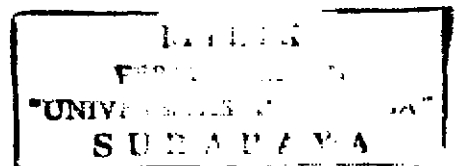
- 1. Wawancara.**
- 2. Observasi.**

#### 6.4.2. Pengolahan data.

Metode analisa yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah :

Data yang telah dikumpulkan dari Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur di Surabaya, Departemen Perdagangan Surabaya, BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur dan Biro Keuangan Dati I Jawa Timur ditabelkan dan diolah dengan memperhatikan beberapa rumus yaitu :

1. Analisa komparatif/perbandingan.
2. Metode perhitungan pertambahan rata-rata dalam persen dengan rumus :  $\frac{n-1}{awal} \frac{akhir}{awal} = 1 \times 100\%$
3. Rumus rata-rata :  $X = \frac{\sum f_i}{n}$



## B A B II

SUMBER DANA PERBANKAN DAN KEBIJAKSANAAN  
PERBANKAN1. Sumber-sumber Dana Perbankan

Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan, maka semakin banyak kebutuhan pembiayaan atau modal yang akan diinvestasikan ke dalam kegiatan pembangunan. Modal yang dibutuhkan tersebut pada umumnya untuk jangka panjang. Oleh karena itu tidaklah mungkin bahwa seluruh kebutuhan dana pembangunan tersebut disediakan oleh pihak perbankan sendiri.

Khususnya di dalam kerangka kegiatan untuk menunjang pembangunan dengan operasi kreditnya, pihak bank akan melaksanakan dengan melakukan penggalan sumber-sumber dananya dari berbagai pihak yang dapat diutarakan sebagai berikut :

- Mengingat bahwa untuk operasional kredit dengan tujuan pembangunan itu membutuhkan permodalan khusus atau jangka panjang maka pengerahan dana dilandaskan pada :
1. Dana asal dari masyarakat banyak yang khusus dikerahkan dengan bentuk berbagai perangsang (bunga yang menarik, hadiah).
  2. Deposito berjangka panjang.
  3. Dana dari sumber khusus dengan struktur khusus pula misalnya bantuan kredit luar negeri, bank dunia dan sebagainya. 1

---

<sup>1</sup>Tjipto Adi Nugroho, Perbankan Masalah Permodalan Dana dan Potensi, PT Pratiya Paramita, Jakarta, 1974, halaman 127-128.

Menurut Tjipto Adi Nugroho sumber-sumber dana perbankan dapat digali melalui dana Masyarakat, Deposito, Bantuan Luar Negeri, Bank Dunia.

Sepanjang pengamatan yang dilakukan pada Bank Indonesia Cabang Surabaya diperoleh keterangan bahwa sumber-sumber dana perbankan terdiri dari :

- Giro
- Deposito
- Tabungan.

Pengertian giro di sini adalah "demand deposit", yaitu "simpanan dari pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan".<sup>2</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan Deposito adalah "time deposit". Atau yang dikenal dengan pengertian "Deposito berjangka", yaitu "simpanan pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan Bank yang bersangkutan".<sup>3</sup> Ketentuan waktu yang diperlukan pada dunia perbankan sampai dengan penulisan skripsi ini dapat diperinci sebagai berikut :

---

<sup>2</sup>Undang-undang No. 14 Th. 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 Th. 1968 Tentang Bank Sentral, diperbanyak oleh Biro Penerbitan Senat Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, 1976, halaman 3.

<sup>3</sup>Ibid, halaman 3.



- kurang dari 3 bulan
- sampai dengan 3 bulan
- sampai dengan 6 bulan
- sampai dengan 12 bulan
- sampai dengan 18 bulan
- sampai dengan 24 bulan.

Jadi ada 6 (enam) kelompok waktu yang diperlukan untuk simpanan deposito berjangka sebagaimana terperinci pada ulasan tersebut di atas.

Pengertian tabungan adalah "simpanan pihak ketiga ke pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu"<sup>4</sup>.

Adapun tabungan di sini meliputi :

- TABANAS, singkatan dari Tabungan Pembangunan Nasional.
- TASKA, singkatan dari Tabungan Asuransi Berjangka.
- TAPELPRAM, singkatan dari Tabungan Pemuda Pelajar dan Pramuka.

Di samping itu dianggap perlu untuk memberikan gambaran tentang pengertian tabungan secara umum yaitu :

Yang dimaksud dengan tabungan masyarakat adalah bagian dari penghasilan masyarakat yang tidak dipergunakan untuk konsumsi dan terdiri dari tabungan perusahaan baik swasta maupun milik pemerintah, tabungan pemerintah daerah, tabungan rumah tangga dan perorangan dan

---

<sup>4</sup> Ibid, halaman 3.

sebagainya. Adapun tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat bersama-sama merupakan tabungan dalam negeri.<sup>5</sup>

Menurut pengertian tersebut di atas tabungan akan dapat diwujudkan bilamana masyarakat mempunyai pendapatan. Dan pendapatannya belum merupakan suatu jaminan penuh terhadap tabungan, karena masih tergantung pada besar kecilnya tingkat konsumsi masyarakat. Bilamana seluruh pendapatannya habis untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, maka tabungan tidak akan ada.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tabungan masyarakat akan dapat dihimpun bilamana tingkat pendapatan masyarakat telah mencapai suatu tingkat di mana kebutuhan konsumsinya telah terpenuhi dan masih terdapat kelebihan. Sebaliknya apabila dari tingkat pendapatannya hanya mencukupi untuk memenuhi tingkat konsumsinya saja dan dipaksakan untuk melakukan penabungan maka konsekwensinya mereka harus menekan atau mengorbankan ataupun menengguhkan konsumsinya. Tanpa adanya persyaratan yang demikian itu dapat dipastikan bahwa tabungan tidak akan dapat dihimpun dari tangan masyarakat.

Namun demikian perlu kiranya diutarakan bahwa di dalam kerangka untuk mendidik generasi penerus dalam kegiatan

---

<sup>5</sup>Departemen Penerangan R.I., Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua, 1974/75-1978/79, Departemen Penerangan R.I. Jakarta, 1974, Buku I, halaman 190-191

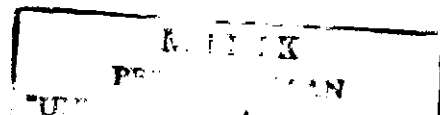
menabung telah dirintis suatu kebijaksanaan peningkatan Tabungan Pemuda Pelajar dan Pramuka (TAPELPRAM).

Meskipun mereka ini tidak termasuk di dalam pengertian masyarakat yang memiliki pendapatan karena belum bekerja namun dengan sejumlah uang belanja yang diterima dari orang tua mereka diharapkan untuk dihemat dan ditabung.

Sebenarnya di dalam pengertian itupun telah teroakup suatu penekanan atau pengorbanan ataupun penundaan beberapa kebutuhan mereka sebagaimana telah diutarakan di atas. Dan bagian dari uang belanja mereka ini selanjutnya dapat disalurkan pada jenis tabungan yang dikenal dengan "TA PELPRAM".

Demikian juga masalahnya dengan "giro" yang pada umumnya banyak dimiliki oleh kegiatan di bidang usaha (baik produksi maupun perdagangan), adalah penundaan kebutuhan mereka untuk sementara dan yang dititipkan pada bank, di mana pada setiap saat mereka akan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi faktor penundaan pemenuhan konsumsi dalam pengertian tersebut dapat dikatakan merupakan tabungan.

Dari berbagai jenis ataupun macam tabungan masyarakat, pihak perbankan dapat memanfaatkannya untuk menyalurkan dana-dana tersebut kearah penggunaan yang lebih produktif, yaitu menyalurkannya pada berbagai kegiatan untuk investasi, agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan diharapkan akan dapat me-



tingkatkan tabungan yang merupakan sumber dana perbankan. Proses tersebut apabila berjalan secara terus-menerus, diharapkan akan dapat mempercepat proses pembangunan.

Bagi suatu negara yang sedang membangun pada umumnya menghadapi masalah kebutuhan tabungan untuk membiayai investasi, di mana kemampuan menabung masih berada pada tingkat yang rendah, sehingga :

Kemampuan menabung adalah ketjil sekali, karena pendapatan riil rendah. Pendapatan yang rendah merupakan tjermin dari pada produktivitet yang rendah. Produktivitet yang rendah untuk sebagian besar adalah akibat kekurangan (peralatan) modal. Kekurangan modal disebabkan karena kemampuan menabung yang rendah dan dengan begitu kita menghadapi lingkaran yang seakan-akan tiada akhirnya. Tiap usaha untuk menaikkan produktivitet harus bersandar atas tabungan. Tabungan di sini diartikan sebagai kemampuan dan kesediaan untuk menahan nafsu konsumsi selama beberapa waktu supaya dimasa depan terbuka kemungkinan konsumsi yang lebih memuaskan.<sup>6</sup>

Masalah tabungan yang digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi tersebut, dapat diibaratkan sebagai jalinan yang memberikan suatu gambaran lingkaran setan.

Bilamana tingkat pendapatannya adalah rendah, maka dapat dikatakan bahwa masih banyak kebutuhan konsumsinya yang belum terpenuhi. Dengan perkataan lain suatu tingkat pendapatan yang rendah mengakibatkan tingkat kemampuan menabungnya juga akan rendah.

---

<sup>6</sup>Sumitro Djojohadikusumo, Ekonomi Pembangunan, PT-Pembangunan, Jakarta, 1955, halaman 65.

Pengaruh rendahnya tingkat kemampuan menabung tersebut akan mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas yang selanjutnya akan mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatannya.

Lingkaran setan tersebut di atas bagaimanapun juga harus dapat dipecahkan, bilamana dikehendaki adanya kegiatan pembangunan ekonomi yang akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sumbernya kembali lagi pada titik pokok yaitu penggalan sumber dana pembangunan ekonomi tersebut dari tabungan masyarakat. Oleh karena itu pengertian tabungan dalam hal ini merupakan suatu sikap untuk mengorbankan hasrat mengkonsumsi pendapatannya pada masa sekarang. Namun pengorbanan tersebut akan membuka kemungkinan untuk meningkatkan konsumsinya pada masa mendatang. Sebagai akibat penggunaan tabungan untuk membiayai pembangunan ekonomi yang diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatannya. Dengan kenaikan pendapatannya itulah yang selanjutnya akan dapat meningkatkan konsumsinya.

Naiknya tingkat konsumsi masyarakat tersebut merupakan suatu perangsang bagi para pengusaha untuk meningkatkan kegiatan usahanya, yang umumnya akan diimbangi dengan naiknya permintaan kredit untuk meningkatkan investasinya. Bilamana proses tersebut di atas dapat ditunjang oleh pihak Lembaga Perbankan, maka akselerasi pembangunan akan dapat berjalan dengan lancar, sehingga pada akhirnya

nanti tendensi pendapatan akan semakin meningkat sepanjang kegiatan pembangunan dilaksanakan.

## 2. Kebijaksanaan Perbankan untuk Meningkatkan Sumber Dana

Dalam rangka menghimpun dan mengalokasikan dana pembangunan ekonomi, maka pihak Lembaga Perbankan akan berfungsi sebagai :

1. Fungsi khusus bank sebagai aparatur ekonomis pemerintahan yang menjalankan policy operasional berdasarkan policy Pemerintah.
2. Fungsi umum bank untuk menampung, melayani kebutuhan masyarakat tentang kebutuhan modal berupa perkredit-an secara routine baik aktif maupun pasif.

Kedua fungsi tersebut melekat pada tugas fungsional bank yang harus terisi oleh *dedication of banking* yang khususnya ditujukan kepada pembangunan. *Dedication of banking* diisi oleh keinginan turut serta membangun mendehsyatkan gelombang pembangunan di semua segi dan ke seluruh penjuru dalam kehidupan masyarakat.

Dari fungsi Lembaga Perbankan di dalam arena pembangunan ekonomi tersebut di atas, kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang pada umumnya diukur dengan tingkat pendapatan yang diperolehnya.

Dwi fungsi Lembaga Perbankan tersebut di atas akan mempercepat proses pembangunan, karena di dalam pasar uang ataupun pasar modal pihak lembaga Perbankan akan dapat menyeimbangkan penawaran dan permintaan terhadap uang/modal.

---

<sup>7</sup> Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Permodalan Dana dan Potensi, PT Pratiya Paramita, Jakarta, 1974, halaman 128.

Di satu pihak akan bertindak selaku penawar, sedangkan di lain pihak akan bertindak selaku peminta modal/uang.

Dengan demikian kestabilan harga yang mempertemukan permintaan dan penawaran uang/modal akan dapat dipelihara.

Sehubungan dengan pengertian tersebut di atas, dalam kerangka REPELITA II Pemerintah telah melotakkan dasar-dasar kebijaksanaan di bidang moneter. Dasar-dasar kebijaksanaan tersebut merupakan lanjutan langkah-langkah kebijaksanaan yang pernah dilakukan pada masa REPELITA I dan kelanjutannya akan lebih ditingkatkan dan disempurnakan.

Sasaran yang dikehendaki di dalam penentuan langkah-langkah kebijaksanaan tersebut adalah : meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui Lembaga-lembaga keuangan, memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat, menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi, menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah, meningkatkan efisiensi kerja dan peranan lembaga-lembaga keuangan.

Sasaran-sasaran tersebut di atas bukanlah berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi masing-masing sebenarnya mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dapat dikatakan sasaran-sasaran tersebut di atas merupakan jenjang-jenjang yang bertautan.

Dengan tabungan yang terhimpun dari masyarakat, pihak Lembaga Perbankan dapat menyelurkannya kepada kegiatan

yang produktif melalui kebijaksanaan kredit. Pengerahan ini ditujukan pada kegiatan-kegiatan produksi yang banyak menyerap tenaga kerja agar dapat memperluas kesempatan kerja.

Dengan terbukanya kesempatan kerja tersebut merupakan suatu kerangka untuk pemerataan pendapatan masyarakat.

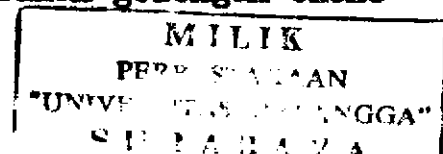
Penyerapan uang yang produktif dari tangan masyarakat melalui program-program tabungan, dan menyalurkannya pada berbagai sektor perekonomian, merupakan suatu langkah-langkah kebijaksanaan yang menuju kearah pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi.

Penyaluran dana investasi kepada golongan ekonomi lemah merupakan suatu tindakan yang akan dapat menunjang dan meningkatkan golongan ekonomi lemah, agar dikelak kemudian hari dapat mempersempit jurang pemisah antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah.

Berbagai sasaran tersebut tentunya menurut suatu kondisi agar pihak Lembaga Perbankan sendiri harus meningkatkan efisiensi kerja. Sehingga peranannya di dalam kegiatan perekonomian dapat lebih ditingkatkan daripada masa sebelumnya.

Demikian pula dengan Repelita III ternyata di dalam perencanaan kebijaksananya diharapkan untuk dapat mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :

- 1) Menunjang usaha pemerataan pembangunan antara lain dengan jalan meningkatkan kedudukan golongan ekono-





- mi lemah, mendorong perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan serta menunjang produksi bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat.
- 2) Meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan baik lembaga-lembaga perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan non bank.
  - 3) Tetap memelihara dan meningkatkan kestabilan ekonomi khususnya kestabilan harga-harga.
  - 4) Menyempurnakan serta meningkatkan efisiensi dan peranan lembaga-lembaga keuangan dalam rangka pengembangan suatu sistim lembaga keuangan yang lebih sehat dan lengkap.<sup>8</sup>

Sasaran pertama dan kedua merupakan sasaran-sasaran yang diharapkan akan dapat meningkatkan akselerasi pembangunan yang diharapkan juga agar pelaksanaannya lebih terarah pada kegiatan yang lebih merata ke berbagai daerah maupun sektor perekonomian, terutama yang menghasilkan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya.

Meningkatnya pembangunan dengan hasil akhir pendapatan masyarakat yang semakin meningkat, diusahakan agar tidak tersalur keseluruhannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya saja. Akan tetapi tetap memperhatikan kepentingan pada masa-masa yang akan datang.

Oleh karenanya tetap diusahakan agar sebagian dari pendapatan mereka tersalur dalam program tabungan masyarakat, yang akan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, sehingga pendapatan masyarakat pada masa men-

---

<sup>8</sup>Departemen Penerangan R. I., Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga. 1979/80-1983/84, Departemen Penerangan R. I., Jakarta, Buku I halaman 3-29. (t. th)

datang lebih meningkat lagi.

Hasrat berusaha akan timbul lebih tinggi kegiairahannya bilamana kestabilan ekonomi pada umumnya kestabilan harga pada khususnya dapat dipelihara dan ditingkatkan. Sasaran tersebut terungkap pada sasaran ketiga di dalam deretan-deretan berbagai sasaran yang dicanangkan pada REPELITA III.

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut di atas tentunya pihak Lembaga Perbankan harus melaksanakan kebijaksanaan yang telah digariskan. Salah satu kebijaksanaan demi untuk mencapai sasaran tadi adalah sebagai berikut :

Kebijaksanaan suku bunga telah sangat berhasil di dalam REPELITA I, baik di dalam pemupukan dana tabungan masyarakat maupun di dalam penyalurannya guna pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan stabilisasi. Kebijakan suku bunga tersebut akan dilanjutkan dan disempurnakan di dalam REPELITA II dengan berpedoman kepada pokok-pokok antara lain (i) kebijaksanaan tersebut harus fleksibel dalam arti harus selalu dapat disesuaikan setiap kali terjadi perubahan-perubahan harga, sehingga tingkat suku bunga yang riil tidak terlalu rendah pada waktu harga-harga melonjak tinggi dan sebaliknya tidak terlalu tinggi pada waktu harga-harga menurun (ii) kebijaksanaan suku bunga harus mencerminkan langkanya modal yang tersedia di dalam perekonomian dan keseluruhan biaya penyaluran modal dari penabung kepada peminjam; (iii) kebijaksanaan suku bunga adalah selektif yang didasarkan kepada urutan prioritas dan jangka waktu peminjaman. <sup>9</sup>

Bahwa untuk memupuk tabungan masyarakat maupun untuk menyalurkan tabungan masyarakat tersebut yang dapat diguna-

---

<sup>9</sup>Departemen Penerangan R.I., Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua, 1974/75-1978/79, Departemen Penerangan R.I., Jakarta, 1974, Buku I, halaman 254.

kan untuk membiayai pembangunan ekonomi, melalui langkah-langkah kebijaksanaan suku bunga yang fleksibel. Dengan pengertian bahwa besarnya suku bunga baik untuk merangsang tabungan masyarakat maupun penyalurannya dikaitkan langsung dengan tingkat perkembangan harga.

Bilamana besarnya suku bunga yang diberikan kepada para penabung sama dengan atau lebih kecil dibandingkan dengan tingkat perkembangan harga maka dalam kondisi yang demikian itu pihak penabung merasa dirugikan. Karena secara riil jumlah tabungan mereka tidak mengalami pertambahan berupa keuntungan bunga, bahkan secara relatif semakin menyusut bilamana tingkat suku bunga jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat perkembangan harga.

Sebaliknya menurunnya tingkat perkembangan harga tanpa diadakan penyesuaian pada tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi akan mengakibatkan pembebanan yang semakin berat dirasakan oleh para pengusaha. Karena tingkat suku bunga kredit yang relatif lebih tinggi merupakan beban berat terhadap biaya produksi, yang akan mempersempit kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan bagi para pengusaha yang bersangkutan. Sedangkan diketahui secara umum bahwa keuntungan yang diperoleh para pengusaha merupakan perangsang terhadap kegiatan usahanya.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas sudah seelayaknya pihak Lembaga Perbankan di dalam menentu-

kan tinggi rendahnya suku bunga diarahkan pada langkanya modal yang tersedia di dalam perekonomian.

Pertimbangannya antara lain diusahakan agar semua konsekuensi biaya penyaluran modal dari para penabung dapat diatasi oleh para peminjam (pengusaha), sedangkan pihak peminjam (pengusaha) masih mendapatkan keuntungan di dalam memanfaatkan penggunaan/pemutaran modal tersebut.

Agar penggunaan modal yang langka tersebut lebih terarah pada kegiatan usaha yang produktif, maka pihak Lembaga Perbankan diharapkan agar di dalam kerangka kebijaksanaannya menggunakan urutan prioritas, jangka waktu peminjaman, dan pada berbagai faktor tersebut di atas juga dibebani dengan suku bunga yang berbeda-beda sesuai dengan prioritas dan jangka waktu peminjaman tersebut di atas.

Untuk meningkatkan kapasitas pemberian kredit dari hasil penghimpunan tabungan masyarakat pihak Lembaga Perbankan mempunyai pedoman pelaksanaan kebijaksanaan Reserve Ratio dengan pengertian sebagai berikut :

Reserve ratio-that percentage of a bank's deposits or other liabilities that must be held in the form of legal reserves.

.....  
Required reserve - that portion of a bank's legal reserves that must be held, given the bank's deposits and other liabilities. <sup>10</sup>

Jadi yang dimaksudkan dengan Reserve Ratio atau Cash Ratio

---

<sup>10</sup> Oliver G. Wood Jr, Commercial Banking, D. Van Nostrand Company, New York, halaman 80, (t.th.).

adalah suatu perbandingan antara dana yang tersedia dengan jumlah kredit yang diberikan atau sering juga dikatakan sebagai suatu perbandingan antara sejumlah alat likwida yang minimal harus dimiliki/dikuasai dengan sejumlah tagihan-tagihan kepada para nasabah.

Dengan adanya ketentuan perimbangan antara dana wajib minimal dengan sejumlah kredit yang dapat diberikan oleh Lembaga Perbankan tersebut, merupakan suatu pedoman untuk menentukan langkah-langkah kebijaksanaannya dalam rangka pemberian jumlah kredit yang direncanakannya. Dengan demikian berarti bahwa Lembaga Perbankan masih diberikan suatu kelonggaran untuk memberikan jumlah kredit-kreditnya. Yang tidak terbatas pada jumlah yang sama dengan jumlah tabungan/dana yang dapat dihimpunnya, akan tetapi dapat dikembangkannya lebih besar lagi jumlahnya daripada dana yang dapat dihimpun.

Menurut "Keputusan No.10/108/Kep/Dir/UPPB/Tanggal 30 Desember 1977 ditetapkan bahwa besarnya Reserve Ratio atau Cash Ratio diturunkan dari 30% menjadi 15%.<sup>11</sup>

Penurunan Reserve Ratio atau Cash Ratio tersebut di atas merupakan kesempatan bagi Lembaga Perbankan untuk meningkatkan/menambah pemberian kreditnya terutama bagi Bank-Bank yang terbatas persediaan dananya.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Joko bagian riset Bank Indonesia Cabang Surabaya, pada bulan April 1980.

Berarti jumlah kredit investasi yang dapat diberikannya akan dapat ditingkatkan dua kali lipat daripada jumlah yang semula dengan suatu perumusan sebagai berikut :

$$\text{Kredit investasi} = \frac{1}{\text{Cash ratio}} \times \text{Jumlah dana yang dihimpun.}$$

Dengan asumsi :

1. Pemberian kredit tersebut terjadi antara sesama lembaga keuangan.
2. Si debitur pada suatu saat tidak menyalurkan dananya kepada lembaga keuangan yang lain, tetapi diciptakan sendiri kredit baru.

Sesuai dengan perumusan tersebut di atas, bilamana suatu bank memiliki dana yang dihimpun sebesar Rp.30 juta dengan ketentuan cash ratio sebesar 30%, maka bank tersebut akan dapat memberikan kredit investasi dengan jumlah maksimal sebesar :

$$\frac{100}{30} \times \text{Rp.30 juta} = \text{Rp.100 juta.}$$

Sehubungan dengan turunnya cash ratio dari 30% menjadi 15% sebagaimana tercantum pada Keputusan No.10/108/Kep/Dir/UPPB/ tersebut di atas, maka bank yang bersangkutan akan dapat memberikan kredit investasi dengan jumlah maksimal sebesar :

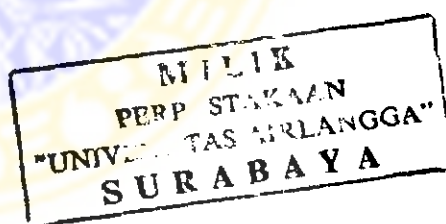
$$\frac{100}{15} \times \text{Rp.30 juta} = \text{Rp.200 juta.}$$

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya jumlah kredit yang dapat diberikan oleh pihak Lembaga Perbankan akan tergantung pada :

- Jumlah dana yang dapat dihimpun.
- Besar kecilnya cash ratio yang ditetapkan.

Kedua determinan tersebut di atas merupakan dua faktor pembatas yang akan menentukan besar kecilnya jumlah kredit yang dapat diberikan oleh suatu Bank.

Namun bagi suatu Bank yang mudah untuk menghimpun/mencari dana yang dapat digunakan untuk menambah dana wajibnya maka kedua faktor tersebut di atas bukanlah merupakan faktor-faktor pembatas.



## B A B III

SUMBER DANA DAN INVESTASI PEMBANGUNAN REGIONAL JAWA  
TIMUR1. Sumber Dana Pembangunan Regional Jawa Timur

Dalam uraian yang berikut ini akan diberikan gambaran tentang sumber dana pembangunan di Regional Jawa Timur dari Tahun 1974/1975 sampai dengan 1978/1979.

Menurut hasil pengamatan dapat diketahui bahwa dana pembangunan di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terdiri dari :

**I. Bantuan Pemerintah Pusat :**

Bantuan yang berasal dari pemerintah pusat antara lain berupa Inpres dan Cess.

**2. Tabungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Tabungan Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tabungan Pemerintah Daerah Tingkat II.****3. Tabungan Masyarakat.**

Yang dimaksudkan di sini adalah tabungan yang dapat dihimpun oleh pihak Perbankan baik bank pemerintah maupun bank swasta secara keseluruhan yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan.

Perkembangan ketiga sumber dana pembangunan regional di Jawa Timur tersebut dapat dilihat pada tabel 1 halaman 32.



TABEL 1

PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN DI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR SELAMA TAHUN 1974/1975 SAMPAI DENGAN TAHUN 1978/1979  
(Dalam Milyar Rupiah)

No.	Tahun	Bantuan Pusat	Tabungan Pemerintah Daerah	Tabungan Masyarakat	Jumlah	Perkembangan	
						Rp.	%
1.	1974/1975	Rp. 46,963	Rp. 3,758	Rp. 74,455	Rp. 125,176	-	-
2.	1975/1976	Rp. 110,252	Rp. 5,318	Rp. 99,431	Rp. 215,051	Rp. 89,875	71,80
3.	1976/1977	Rp. 123,840	Rp. 7,636	Rp. 147,227	Rp. 278,703	Rp. 63,652	29,60
4.	1977/1978	Rp. 156,446	Rp. 9,688	Rp. 169,498	Rp. 335,632	Rp. 56,929	20,43
5.	1978/1979	Rp. 166,554	Rp. 9,931	Rp. 198,180	Rp. 374,665	Rp. 39,033	11,63
Jumlah		Rp. 604,055	Rp. 36,331	Rp. 688,841	Rp. 1.329,227	Rp. 249,489	133,46 131,53

Sumber: - BAPPEDA Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Timur Membangun, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pelita II, BAPPEDA Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya, 1974/1975 sampai dengan 1978/1979.  
- Biro Keuangan Daerah Tingkat I Jawa Timur.  
- Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Surabaya.  
- Diolah penulis.

yang menggambarkan tentang perkembangan dana pembangunan di Jawa Timur yang dapat dihimpun selama PELITA II. Berdasarkan tabel 1 halaman 32 dapat diketahui bahwa seluruh jumlah dana pembangunan Regional di Jawa Timur yang dapat dihimpun selama PELITA II meliputi jumlah sebanyak Rp.1.329.227 milyar. Yang terdiri dari Rp.604,055 milyar berasal dari Bantuan Pusat, dan Rp.36,331 milyar berasal dari Tabungan Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya sebanyak Rp.688,841 milyar dihimpun dari Tabungan Masyarakat.

Secara keseluruhan jumlah dana pembangunan yang dapat dihimpun secara kuantitatif mengalami pertambahan sebanyak Rp.249,489 milyar, atau secara kualitatif tingkat pertambahan sebesar 133,46 % selama PELITA II. Dapat juga dikatakan bahwa setiap tahun rata-rata dana pembangunan regional di Jawa Timur mengalami tingkat laju pertambahan sebesar 31,53 %. Tingkat laju pertumbuhan yang paling tinggi dialami pada tahun 1975/1976 sebesar 71,80 % dan untuk tingkat laju pertumbuhan yang paling rendah dialami pada tahun 1978/1979 yaitu sebesar 11,63%. Pada awal Tahun PELITA II sumber dana pembangunan yang berasal dari Bantuan Pemerintah Pusat berjumlah Rp.46,963 milyar, dari Tabungan Pemerintah Daerah Rp.3,758 milyar sedangkan dari Dana Perbankan mencapai jumlah sebesar Rp.74,455. Jumlah seluruh dana pembangunan yang terhimpun Rp.125,176 milyar.

Pada Tahun 1975/1976 sumber dana pembangunan yang berasal dari Bantuan Pusat berjumlah Rp.110,252 milyar, dari Tabungan Pemerintah Daerah Rp.5,318 milyar dan Dana Perbankan memberikan sumbangan sebesar Rp.99,481 milyar. Jumlah dana yang terhimpun tahun 1975/1976 sebesar Rp.215,051 milyar.

Pada tahun 1976/1977, Bantuan Pemerintah Pusat berjumlah Rp.123,840 milyar, Tabungan Pemerintah Daerah Rp.7,636 milyar sedangkan Dana Perbankan memberikan sumbangan sebesar Rp.147,227 milyar. Dana Pembangunan yang terhimpun tahun 1976/1977 sebesar Rp.278,703 milyar.

Pada tahun 1977/1978 jumlah dana pembangunan yang terhimpun sebesar Rp.335,632 milyar, yang terdiri dari Rp.156,446 milyar dari Bantuan Pemerintah Pusat, Rp.9,688 milyar dari sumber Tabungan Pemerintah Daerah dan dari Dana Perbankan sebesar Rp.169,498 milyar.

Pada akhir Tahun PELITA II jumlah dana pembangunan yang dapat dihimpun sebesar Rp.374,665 milyar, yang terdiri dari sumber Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp.166,554 milyar, dari Tabungan Pemerintah Daerah sebesar Rp.9,931 milyar sisanya sebesar Rp.198,180 milyar berasal dari Dana Perbankan.

Ditinjau dari segi perkembangan jumlah dana pembangunan seperti yang terlihat pada tabel 1 halaman 32 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat laju pertumbuhan dana pembangunan tersebut memperlihatkan tendensi

yang relatif makin mengecil, baik dilihat dari segi tingkat pertumbuhan secara kuantitatif maupun dilihat dari segi tingkat pertumbuhan secara kualitatif.

Namun demikian ditinjau dari segi jumlah dana pembangunan secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan tendensi yang semakin meningkat, karena pada awal tahun PELITA II jumlah dana pembangunan yang terhimpun hanya mencapai jumlah sebesar Rp.125,176 milyar, sedangkan pada akhir tahun PELITA II jumlah tersebut meningkat menjadi jumlah sebesar Rp.374,665 milyar.

Untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut tentang posisi masing-masing sumber dana pembangunan seperti yang telah diutarakan di muka dapat dilihat pada tabel 2 halaman 36. ✓

Dana pembangunan yang digali dari sumber Tabungan Pemerintah Daerah dan Dana Perbankan terlihat bahwa peranannya semakin menurun, sedangkan Bantuan Pemerintah Pusat peranannya meningkat.

Pada awal tahun PELITA II peranan Bantuan Pemerintah Pusat mencapai 37,52 %, Tabungan Pemerintah Daerah 3,00 % sedang Dana Perbankan mencapai 59,48 % dari seluruh dana pembangunan yang dapat dihimpun.

Pada tahun 1975/1976 posisi peranan Bantuan Pemerintah Pusat meningkat mencapai 51,27 %, sedang Tabungan Pemerintah Daerah menurun menjadi 2,47 % sedang Dana Perbankan menurun menjadi 46,26 % dari seluruh dana pembangunan daerah

TABEL 2

PERKEMBANGAN POSISI DANA PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR SELAMA TAHUN 1974/1975 SAMPAI DENGAN TAHUN 1978/1979  
(Dinyatakan Dalam Persen)

No.	Sumber	Tahun	1974/1975	1975/1976	1976/1977	1977/1978	1978/1979
1.	Bantuan Pemerintah Pusat		37,52	51,27	44,43	46,61	44,45
2.	Tabungan Pemerintah Daerah		3,00	2,47	2,74	2,89	2,65
3.	Dana Perbankan		59,48	46,26	52,83	50,50	52,90
Jumlah			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: - BAPPEDA Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Timur Membangun, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pelaksana Pelita II, BAPPEDA Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya, 1974/1975 sampai dengan 1978/1979.  
- Biro Keuangan Daerah Tingkat I Jawa Timur.  
- Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Surabaya.  
- Diolah penulis.

yang terhimpun.

Pada tahun 1976/1977 posisi peranan Bantuan Pemerintah menurun menjadi 44,43 %, sedang Tabungan Pemerintah Daerah dan Dana Perbankan meningkat posisinya masing-masing menjadi 2,74 % dan 52,83 % dari seluruh dana pembangunan yang terhimpun.

Pada tahun 1977/1978 posisi peranan Bantuan Pemerintah Pusat dan Tabungan Pemerintah Daerah meningkat masing-masing menjadi 46,61 % dan 2,89 % dari seluruh dana yang terhimpun sedang Dana Perbankan menurun peranannya menjadi 50,50 % dari seluruh dana pembangunan.

Pada akhir Tahun PELITA II peranan Bantuan Pemerintah Pusat dan Tabungan Pemerintah Daerah menurun masing-masing menjadi 44,45 % dan 2,65 % dari seluruh dana pembangunan sedangkan peranan Dana Perbankan meningkat menjadi 52,90%.

Berdasarkan uraian tersebut di atas akhirnya dapat disimpulkan bahwa :

- Meskipun secara kualitatif selama PELITA II peranan sumber dana pembangunan dari Bantuan Pemerintah Pusat meningkat dan dari dana perbankan menurun tapi kenyataannya sumbangannya terhadap dana pembangunan secara keseluruhan, dana Perbankan lebih berperan. Karena setiap tahun lebih 50 % dari seluruh jumlah dana pembangunan didapat dari sumber Dana Perbankan kecuali pada tahun 1975/1976 Dana Perbankan hanya

mampu menyumbang sebesar 46,26 % dari seluruh dana pembangunan yang terhimpun.

- Meskipun sumber dana pembangunan yang berasal dari Tabungan Pemerintah Daerah menurun peranannya, tetapi secara kuantitatif jumlahnya meningkat di mana pada tahun pertama PELITA II mampu menghimpun sebesar Rp.3,758 milyar pada akhir tahun PELITA II mencapai jumlah sebesar Rp.9,931 milyar.
- Menurunnya peranan Bantuan Pemerintah Pusat berarti pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mengalami kemajuan dengan makin kecilnya peranan Pemerintah dan makin besarnya peranan non pemerintah.

## 2. Investasi Pembangunan di Jawa Timur

Dalam bab ini diberikan gambaran tentang sumber investasi pembangunan di Jawa Timur yang telah dilaksanakan maupun yang diharapkan. Jumlah investasi yang telah dilaksanakan pada REPELITA I dan REPELITA II dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 pada halaman 39 dan 40, menunjukkan bahwa pada pelaksanaan REPELITA I jumlah investasi pembangunan mencapai jumlah sebanyak Rp.414,595 milyar. Dari jumlah investasi pembangunan tersebut yang digali dari sumber Pemerintah mencapai jumlah sebanyak Rp.113,673 milyar, sisanya sebanyak Rp.300,922 milyar digali dari sumber non

TABEL 3

## INVESTASI PEMBANGUNAN JAWA TIMUR PELITA I (Dalam Ribuan Rupiah)

Sumber Tahun	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	Jumlah Pelita I
Pemerintah	13.203.000	19.013.705	20.396.478	25.017.309	36.041.313	113.672.705
Non Pemerintah	12.985.540	42.859.225	42.179.220	78.828.070	124.070.670	300.922.726
Jumlah	26.188.540	61.872.930	62.575.698	103.845.379	160.111.983	414.595.431

Sumber: Team Evaluasi Pembangunan Di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (BAPPEDA), Jawa Timur Membangun. Eka Desa Warsa 1969-1979, Team Evaluasi Pembangunan di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (BAPPEDA), Surabaya, tahun 1980, Buku III, halaman 274.



TABEL 4

INVESTASI PEMBANGUNAN JAWA TIMUR PELITA II  
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun Sumber	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	Jumlah Pelita I
Pemerintah	54.053.604,50	89.535.163,00	123.470.693,00	154.549.590,000	188.588.399,020	609.227.459,920
Non Peme- rintah	260.708.864,00	366.956.196,00	401.729.177,00	415.579.471,863	1.119.867.971,759	1.964.301.614,612
Jumlah	314.762.468,50	456.521.359,00	525.199.810,00	569.129.061,863	1.308.456.370,779	2.573.529.069,532

Sumber: Team Evaluasi Pembangunan di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (BAPPEDA), Jawa Timur  
Membangun. Eka Dasa Warsa 1969-1979, Team Evaluasi Pembangunan di Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Jawa Timur (BAPPEDA), Surabaya, 1980, Buku III, halaman 275.

pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggalan investasi pembangunan dari pihak non pemerintah memegang peranan sebesar 72,58 %, yang menggambarkan betapa besar sumbangan sumber non pemerintah dibandingkan dengan pemerintah.

Peranan sumber non pemerintah di Jawa Timur terhadap pelaksanaan REPELITA II kenyataannya mengalami kenaikan dibandingkan dengan pelaksanaan pada REPELITA I. Karena pada pelaksanaan REPELITA II sumber non pemerintah yang merupakan salah satu sumber investasi pembangunan dapat menghimpun dana sebanyak Rp.1.964,3 milyar, berarti perannya mencapai tingkat sebesar 76,33 %. Maka dapat disimpulkan bahwa peranan sumber non pemerintah terhadap investasi pembangunan mengalami kenaikan sebesar 3,75%.

Kalau pada tahun pertama REPELITA I jumlah sumber non pemerintah hanya mencapai Rp.12,986 milyar sedangkan jumlah sumber pemerintah sebesar Rp.13,203 milyar, maka menggambarkan suatu perimbangan bahwa dengan jumlah investasi pembangunan sebesar Rp.26,189 milyar tersebut ternyata peranan sumber non pemerintah hanya mencapai tingkat sebesar 49,59 %, berarti peranan sumber pemerintah pada waktu itu mencapai tingkat sebesar 50,41 %. Dengan perkataan lain peranan sumber Pemerintah terhadap pembangunan daerah Jawa Timur lebih besar bilamana dibandingkan dengan peranan sumber non pemerintah. Namun pada tahun-tahun yang

selanjutnya sampai dengan akhir tahun REPELITA I tersebut terlihat bahwa peranan tersebut berbalik. Bahkan sumber non Pemerintah semakin menunjukkan jumlah yang berlipat ganda dibandingkan dengan jumlah sumber Pemerintah di dalam kerangka pelaksanaan REPELITA I tersebut.

Sumber investasi pembangunan yang digali melalui sumber non Pemerintah tersebut menunjukkan perkembangan yang semakin menanjak jumlahnya. Demikian juga perimbangannya bilamana dibandingkan dengan jumlah investasi pembangunan yang digali melalui sumber dari Pemerintah. Seperti yang terlihat pada tabel 4 pada tahun 1978/1979 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan REPELITA II; berdasarkan investasi pembangunan sebesar Rp.1.308,456 milyar ternyata yang bersumber dari Pemerintah hanya mencapai jumlah sebesar Rp.188,588 milyar, sedangkan yang bersumber dari non Pemerintah mencapai jumlah sebesar Rp.1.119.868 milyar. Berarti peranan sumber Pemerintah terhadap investasi pembangunan regional Jawa Timur hanya mencapai tingkat sebesar 14,41 %.

Sebaliknya penggalan sumber investasi pembangunan dari non Pemerintah di Jawa Timur mencapai tingkat sebesar 85,59 %. Dengan perkataan lain investasi pembangunan pada tahun 1978/1979 menunjukkan perimbangan bahwa perbandingan antara sumber dari Pemerintah dengan sumber dari non Pemerintah ternyata jumlah sumber non Pemerintah hampir 6 (enam)

kali lipat jumlah sumber dari Pemerintah.

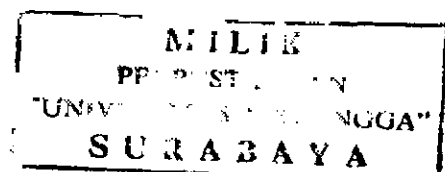
Menurut analisa tersebut di atas penulis berkesimpulan bahwa akselerasi pembangunan regional Jawa Timur banyak tergantung kepada hasil penggalian sumber investasi pembangunan dari non Pemerintah/swasta.

Sepanjang pengamatan penulis, ternyata investasi pembangunan non Pemerintah terdiri dari :

- Investasi pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta dengan jalan menanamkannya dalam bentuk Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN).
- Swadaya Masyarakat yang pada umumnya berupa prasarana ekonomi.
- Penggalian sumber investasi pembangunan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Perbankan.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa sumber investasi pembangunan regional Jawa Timur dalam garis besarnya terdiri dari 2 (dua) sumber investasi pembangunan yaitu sumber Pemerintah dan sumber non Pemerintah. Sumber non Pemerintah pada hakekatnya terdiri dari 3 (tiga) sumber yang meliputi PMA/PMDN, Swadaya masyarakat, dana Perbankan. Demikianlah gambaran tentang sumber investasi pembangunan regional Jawa Timur.

✓ Berbicara masalah investasi pembangunan Jawa Timur



kurang lengkaplah bila mana tidak menyinggung masalah tingkat laju pertumbuhan pendapatan masyarakat di Jawa Timur yang pada umumnya dinyatakan dengan Gross Regional Domestic Product atau disingkat dengan G.R.D.P.

Di samping itu perlu diperhatikan besarnya koefisien yang menunjukkan suatu nilai perbandingan atau ratio antara penambahan input (faktor-faktor produksi) terhadap penambahan output (produk). Ratio yang demikian itu dikenal dengan nama I.C.O.R. yang merupakan singkatan dari Incremental Capital Output Ratio, di mana I.C.O.R. Jawa Timur ditentukan 2,5.<sup>1</sup>

Dari hasil wawancara antara penulis dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, diperoleh penjelasan bahwa besarnya tingkat laju pertumbuhan Gross Regional Domestic Product ditetapkan sebesar 6,5<sup>2</sup> rata-rata setiap tahun selama pelaksanaan REPELITA III. Dengan berbagai asumsi tersebut akhirnya dapat dibuat suatu kerangka pembangunan regional Jawa Timur sebagaimana yang terlihat pada tabel 5 halaman 45.

Bahwa untuk meningkatkan Gross Regional Domestic Product dari "Rp.3.601 milyar pada tahun 1978/1979 menjadi Rp.4.933,67 milyar pada tahun 1983/1984 dibutuhkan pertambahan investasi sebanyak kurang lebih Rp.3.331,71 milyar".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Sockadi bulan Maret 1980 dari BAPFEDA Daerah Tingkat I Jawa Timur.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Sockadi bulan Maret 1980 dari BAPFEDA Daerah Tingkat I Jawa Timur.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Sockadi bulan Maret 1980 dari BAPFEDA Daerah Tingkat I Jawa Timur.

TABEL 5

PERKEMBANGAN GRDP DAN PERTAMBAHAN INVESTASI PROPINSI JAWA TIMUR YANG DIPERLUKAN  
DALAM PELITA III 1979/80-1983/84 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1978  
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun Penjelasan	1978/79	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	Repelita III
G.R.D. P.	3.601	3.835,07	4.084,34	4.349,83	4.632,56	4.933,67	3.596,07
Pertambahan In- vestasi		585,16	623,20	663,71	706,85	752,79	3.331,71
a. Pemerintah		234,06	249,28	265,48	282,74	301,12	1.332,68
b. Swasta		351,10	373,92	398,23	424,11	451,67	1.999,03

Sumber: Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 1979/80-1983/84, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya, 1980, Buku I, halaman 7-4 - 7-5.

Investasi pembangunan tersebut diharapkan dari sumber Pemerintah akan dapat menghimpun investasi pembangunan sebanyak Rp.1.332,68 milyar, sedangkan dari sumber non Pemerintah diharapkan akan dapat digali investasi pembangunan sebanyak Rp.1.999,03 milyar".<sup>4</sup> Dengan demikian berarti bahwa investasi pembangunan yang digali oleh sektor pemerintah diperkirakan akan mencapai tingkat sebesar 40 %, sedangkan yang 60 % diharapkan akan digali dari sektor swasta/non Pemerintah.

Persoalannya apakah penggalan sumber investasi dari sektor non Pemerintah tersebut di atas akan dapat tergalinya sesuai dengan yang diharapkan ataukah tidak. Untuk memecahkan persoalan ini kiranya dapat dipertimbangkan dengan meninjau kembali hasil penggalan investasi pembangunan di Jawa Timur pada pelaksanaan REPELITA I maupun REPELITA II yang lalu.

Di muka penulis telah memberikan suatu analisa tentang pelaksanaan penggalan sumber investasi pembangunan Regional Jawa Timur pada PELITA I dan PELITA II. Realisasi hasil penggalan sumber investasi pembangunan selama PELITA I pihak sektor non Pemerintah dapat menghimpun investasi pembangunan sebesar 72,58 %. Dan realisasi hasil penggalan sumber investasi pembangunan selama PELITA II dapat meng-

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Soekadi bulan Maret 1980 dari BAPPEDA Daerah Tingkat I Jawa Timur.

himpun investasi pembangunan sebesar 76,33 %. Berdasarkan data tersebut di atas bilamana dikaitkan dengan pengharapan agar di dalam pelaksanaan REPELITA III pihak non pemerintah dapat menghimpun investasi sebesar 60 %, menurut hemat penulis jumlah tersebut akan dapat dicapai.

Bahkan dapat disimpulkan bahwa dengan penghimpunan investasi sebesar 60 % untuk REPELITA III sebagaimana tersebut di atas menunjukkan suatu kecenderungan bahwa peranan pihak non pemerintah di dalam kegiatan pembangunan mengalami penurunan bilamana dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Dalam pelaksanaan PELITA II misalnya, ternyata pihak non pemerintah mampu untuk menghimpun jumlah investasi pembangunan sebanyak Rp.1.964,30 milyar. Sedangkan di dalam kerangka REPELITA III diharapkan agar pihak non pemerintah dapat menghimpun investasi sebanyak Rp.1.999,03 milyar. Berarti di dalam kerangka REPELITA III dibandingkan dengan realisasi PELITA II pihak non pemerintah diharapkan akan dapat meningkatkan investasi pembangunan sebanyak Rp.34,73 milyar. Dengan perkataan lain pihak non pemerintah di dalam kerangka penghimpunan investasi pembangunan selama REPELITA III nanti hanya akan mengalami tingkat laju pertumbuhan sebesar 1,77 %. Sedangkan pada realisasi PELITA I ke PELITA II pihak non pemerintah dapat menghimpun investasi pembangunan dengan



tingkat laju pertumbuhan sebesar 552,765 % (uang merupakan hasil perhitungan secara kasar), dari Rp.300,92 milyar pada PELITA I menjadi Rp.1.964,30 milyar pada PELITA II, dan peningkatan investasi sebesar 3,75 %. Pada REPELITA III dibandingkan PELITA II mengalami penurunan 16,35 %.

Tegasnya penulis kurang sependapat apabila di dalam kerangka REPELITA III pihak non pemerintah diturunkan peranannya dari 76,33 % menjadi 60 % khususnya di dalam kerangka penghimpunan investasi pembangunan Regional Jawa Timur.

Karena turunnya peranan non pemerintah akan diimbangi oleh naiknya peranan pemerintah dalam masalah investasi pembangunan regional Jawa Timur. Sedangkan hakekat naiknya investasi pembangunan yang dihimpun oleh pemerintah terutama dengan kebijaksanaan pajak, berarti akan diarahkan kepada kenaikan beban pajak. Seperti diketahui bahwa naiknya beban pajak akan mengakibatkan turunnya disposable income masyarakat. Dengan demikian berarti bahwa daya beli masyarakat akan turun, yang akhirnya dapat diistimasi-kan bahwa pada proses REPELITA III akan mengalami kelesuan dalam kegiatan produksi.

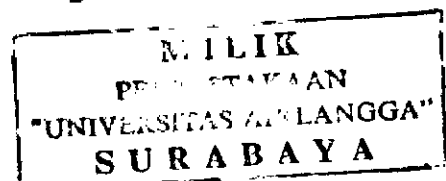
Mengingat pengamatan tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk mempertahankan akselerasi pembangunan regional Jawa Timur seyogyanya peranan pihak non

pemerintah ditingkatkan atau dipertahankan pada tingkat yang sama dengan kondisi pada pelaksanaan PELITA II sekurang-kurangnya sama dengan peranan yang pernah dicapai pada saat PELITA I. Dengan demikian per-harapan pemerintah di mana swasta berperan 60% itu menurut pandangan penulis under estimate mengingat kondisi PELITA III di Jawa Timur membutuhkan investasi yang semakin meningkat.

### 3. Alokasi Kredit Perbankan di Jawa Timur

Di dalam penyaluran perkreditan pihak Lembaga Perbankan selain menggunakan modal sendiri, mempergunakan dana yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya dialokasikan pada sektor produksi, sektor ekspor, dan sektor lain-lain. Namun sebelum penulis memberikan gambaran tentang pengalokasian kredit perbankan untuk kegiatan pembangunan sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu akan diutarakan tentang perkembangan kredit perbankan di Jawa Timur selama PELITA II.

Selama pelaksanaan PELITA II pihak Lembaga Perbankan di Jawa Timur telah dapat merealisasikan pemberian kredit sebesar Rp.1.520.313 juta. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel 6 halaman 50, di mana untuk tahun 1974/1975 pemberian kredit yang dilakukan oleh Lembaga Perbankan Jawa Timur berjumlah Rp.166.101 juta, sedangkan pada tahun 1978/1979 meningkat menjadi Rp.456.076 juta. Berarti selama PELITA II Lembaga Perbankan di Jawa Timur telah berhasil menambah jumlah kreditnya sebesar Rp.289.975 juta. Dengan perkataan lain perkembangan kredit perbankan di Jawa



TABEL 6

PERKEMBANGAN KREDIT PERBANKAN  
DI JAWA TIMUR SELAMA  
PELITA II

Tahun	Jumlah (dalam jutaan rupiah)	Pertambahan	
		dalam %	(dalam jutaan rupiah)
1974/1975	166.101	-	-
1975/1976	232.842	40,18	66.741
1976/1977	300.358	29,00	67.516
1977/1978	364.936	21,50	64.578
1978/1979	456.076	24,97	91.140
	1.520.313	115,65	289.975

Sumber: Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Surabaya.  
Diolah penulis.

Timur mengalami tingkat laju pertumbuhan rata-rata sebesar 28,73 % setiap tahun.

Jumlah kredit perbankan tersebut di atas dialokasikan kepada 3 (tiga) sektor yang meliputi sektor produksi, sektor ekspor dan sektor lain-lain. Dengan perkembangan sebagaimana terlihat pada tabel 7 halaman 52.

Pada tabel 7 tersebut diperlihatkan perkembangan alokasi kredit perbankan di Jawa Timur dinyatakan dalam persen. Ternyata sektor ekspor memperlihatkan tendensi yang semakin menurun selama PELITA II. Kalau pada tahun 1974 mencapai perimbangan sebesar 6,77 % ternyata pada tahun 1979 menunjukkan perimbangan sebesar 1,80 %.

Sepanjang pengamatan penulis turunnya kredit untuk sektor ekspor tersebut bukan berarti bahwa sektor yang bersangkutan kegiatannya semakin menurun, akan tetapi justru memperlihatkan perkembangan yang semakin meningkat berdasarkan tabel 8 halaman 53. Di mana untuk tahun 1974/1975 jumlah nilai ekspor Jawa Timur mencapai US \$ 97.342.983,42 jumlah tersebut mengalami perkembangan menjadi US \$ 198.498.565,55. Berarti selama REPELITA II ekspor Jawa Timur mengalami tingkat laju pertumbuhan sebesar 19,50 % rata-rata setiap tahun.

Berdasarkan pengamatan tersebut akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah kebutuhan dana pembangunan pada sektor ekspor di Jawa Timur ternyata dapat dibiayainya sendiri dengan keuntungan yang diperolehnya dan diin-

TABEL 7

## PERKEMBANGAN ALOKASI KREDIT PERBANKAN DI JAWA TIMUR SELAMA

## PELITA II

(Dinyatakan dalam Persen)

Tahun Sektor	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Produksi	39,64	50,88	57,87	60,74	56,77	56,92
Ekspor	6,77	5,20	3,46	2,20	2,31	1,80
lain-lain	53,59	43,92	38,67	37,06	40,92	41,28
Jumlah :	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Surabaya.  
Diolah penulis.

TABEL 8

PERKEMBANGAN EKSPOR JAWA TIMUR TAHUN  
1974/75 - 1978/79  
(Dalam US \$)

Tahun	Nilai Ekspor	Pertambahan/Penurunan	
		(US \$)	(%)
1974/75	97.342.983,42	-	-
1975/76	96.342.971,37	725.012,05	0,74
1976/77	134.163.321,63	37.545.350,26	38,97
1977/78	161.161.927,78	26.998.616,15	20,12
1978/79	198.498.565,55	37.545.350,26	23,30
			$\bar{x}$ 19,50

Sumber: Team Evaluasi Pembangunan di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (BAPPEDA), Jawa Timur Membangun. Eka Dasa Warsa 1969-1979, Team Evaluasi Pembangunan di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (BAPPEDA), Surabaya, 1980, Buku II, halaman 155.  
Diolah penulis.

vestasikan kembali untuk mengembangkan produksinya. Penulis menyadari bahwa kesimpulan yang sedemikian itu masih banyak membutuhkan pengkajian untuk mendapatkan kebenaran.

Namun dikarenakan permasalahannya di luar ruang lingkup analisa skripsi maka untuk sementara dipandang cukup dengan memberikan uraian sebagaimana tersebut di atas.

✓ Pada awal PELITA II terlihat bahwa alokasi kredit perbankan di Jawa Timur penggunaannya cenderung untuk dialokasikan kepada pemberian kredit untuk sektor lain-lain. Di mana untuk sektor tersebut menyerap 53,59 % dari seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh Lembaga Perbankan di Jawa Timur. Sedangkan sektor produksi pada waktu yang bersamaan hanya mendapatkan alokasi pemberian kredit sebesar 39,64 % dari seluruh jumlah pemberian kredit pada saat itu.

Namun kepincangan tersebut di atas oleh pihak Lembaga Perbankan segera disadari bahwa pola kebijaksanaan yang sedemikian itu kurang tepat. Oleh karena itu di dalam kerangka pelaksanaan PELITA II pada tahun-tahun yang selanjutnya telah dirombak dengan jalan lebih banyak mengalokasikannya pada Sektor Produksi. Dan tingkat perimbangan paling tinggi terlihat pada tahun 1977 di mana untuk sektor produksi mendapatkan 50,47 % dari seluruh jumlah kredit yang diberikan.

Adapun meningkatnya pemberian kredit pada sektor lain-lain dari 37,06 % pada tahun 1977 menjadi 40,92 % pada tahun 1978 yang selanjutnya menjadi 41,28 % pada tahun 1979 sebagaimana terlihat pada tabel 7 halaman 52, sepanjang

pengamatan penulis ternyata pengalokasian kredit perbankan tersebut diarahkan pada kegiatan usaha Perdagangan dan Pengangkutan.

Pola kebijaksanaan yang demikian itu menurut hemat penulis sangat tepat sekali.

Karena untuk mengimbangi kegiatan Sektor Produksi yang semakin meningkat, perlu ditunjang oleh kegiatan Usaha Perdagangan dan Pengangkutan. Sebab kedua Sub Sektor tersebut merupakan kegiatan usaha yang sangat menentukan laju pertumbuhan Sektor Produksi. Baik dalam rangka pemasaran hasil produksinya maupun di dalam kerangka untuk mendapatkan bahan baku untuk proses produksinya.



## B A B IV

PERKEMBANGAN DAN PENGARUH DANA PERBANKAN  
TERHADAP PEMBANGUNAN REGIONAL  
JAWA TIMUR1. Perkembangan Dana Perbankan di Jawa Timur

Di dalam uraian di bawah ini akan diberikan gambaran mengenai perkembangan Dana Perbankan di Jawa Timur sejak tahun 1974/1975 sampai dengan tahun 1978/1979. Berdasarkan tabel 9 pada halaman 57 jumlah Dana Perbankan di Jawa Timur selama periode PELITA II telah bertambah sebanyak Rp.123.725 juta atau sebesar 123,66 % dengan tingkat laju pertumbuhan rata-rata setiap tahun sebesar 27,73 %. Tingkat laju pertumbuhan Dana Perbankan di Jawa Timur tersebut yang paling tinggi dialami pada tahun 1975/1976 dan tahun 1976/1977 dengan tingkat laju pertumbuhan masing-masing sebesar 33,61 % dan 48 %. Sebaliknya tingkat laju pertumbuhan yang paling rendah dialami pada tahun 1977/1978 yang hanya mencapai tingkat sebesar 15,13 %.

Namun pada tahun-tahun berikutnya jumlah dana Perbankan tersebut mengalami perkembangan yang semakin menanjak tingkatnya. Pada tahun 1978/1979 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami tingkat laju pertumbuhan sebesar

**TABEL 9**  
**PERKEMBANGAN DANA PERBANKAN DI JAWA TIMUR TAHUN 1974/75-1978/79**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Giro	Deposito	Tabungan	Jumlah	Perkembangan	
					Rp.	%
1974/75	46.245	22.966	5.244	74.455		
1975/76	54.423	37.002	8.056	99.481	25.026	33,61
1976/77	71.922	60.152	15.153	147.227	47.746	48,00
1977/78	89.966	60.988	18.544	169.498	22.271	15,13
1978/79	112.065	60.469	25.646	197.180	28.682	16,92

Sumber: Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Surabaya.  
 Diolah penulis.

16,92 %.

Dengan tingkat laju pertumbuhan seperti yang diutarakan dalam pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa jumlah Dana Perbankan yang semula berjumlah sebesar Rp.74.455 juta tahun 1974/1975 mengalami perkembangan menjadi Rp.198.180 juta pada tahun 1978/79.

Dalam perkembangannya Dana Perbankan tersebut dapat diketahui bahwa sumber terbesar dari dana tersebut berasal dari Giro. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 50 % jumlah dana yang terhimpun berasal dari dana Giro, kecuali untuk tahun 1976 yang hanya mencapai jumlah sebesar 48,85 % dari seluruh jumlah Dana Perbankan.

Sumber lain yang termasuk besar juga setelah Giro adalah Deposito, di mana pada tahun 1976/77 dengan posisi Giro yang relatif menurun, ternyata sumber dana dari Deposito mengalami perkembangan hingga mencapai jumlah sebesar 40,86 % dari seluruh jumlah Dana Perbankan yang dapat dihimpun pada saat itu.

Deposito ini pada umumnya menunjukkan posisi antara 23,36% sampai dengan 40,86 % dari seluruh Dana Perbankan yang terhimpun.

Posisi terakhir sebagai sumber Dana Perbankan tersebut adalah Tabungan. Kalau pada tahun 1974/1975 hanya berada pada posisi sebesar 7,04 % dari seluruh jumlah dana, ternyata jumlahnya mengalami perkembangan dengan posisi sebesar

12,94 % pada tahun 1978/79. Perkembangan posisi Dana Perbankan tersebut dapat dilihat pada tabel 10 halaman 60.

Secara kuantitatif seluruh sumber dana perbankan tersebut mengalami peningkatan. Kalau jumlah giro pada tahun 1974/75 hanya mencapai Rp.46.245 juta, ternyata pada tahun 1978/79 jumlahnya meningkat menjadi Rp.112.065 juta. Demikian pula dengan Deposito yang semula hanya berjumlah Rp.22.966 juta, pada kurun waktu yang sama meningkat jumlahnya menjadi Rp.60.469 juta. Tabungan yang semula hanya dapat menghimpun dana sebesar Rp.5.244 juta pada tahun 1978/79 meningkat jumlahnya menjadi Rp.25.646 juta.

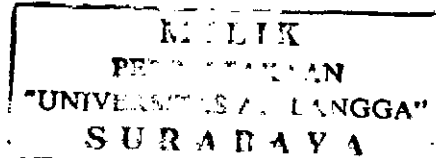
Melihat perkembangan dana perbankan yang demikian itu sebenarnya menunjukkan kecenderungan bahwa masyarakat telah menyadari masa depannya, yang akan ditentukan oleh kesadaran menabung pada masa sekarang. Melonjaknya sumber dana tabungan yang dihimpun dari para penabung kecil menunjukkan suatu kenyataan bahwa kemampuan menabung bukanlah monopoli golongan ekonomi kuat saja, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh golongan ekonomi lemah.

Pada umumnya peralatan kebijaksanaan yang digunakan untuk merangsang dana perbankan adalah kebijaksanaan tingkat bunga. Kenaikan tingkat suku bunga akan merangsang para penabung untuk memperbesar jumlah tabungannya, demikian juga bagi mereka yang belum memiliki tabungan akan segera menitipkan uangnya pada bank. Namun dengan memperhatikan

**TABEL 10**  
**PERKEMBANGAN POSISI DANA PERBANKAN DI JAWA TIMUR TAHUN**  
**1974/75 - 1978/79**  
**(Dalam Persen)**

Tahun	G i r o	Deposito	Tabungan	Jumlah
1974/75	62,11	30,85	7,04	100
1975/76	54,70	37,20	8,10	100
1976/77	48,85	40,86	10,29	100
1977/78	53,08	35,98	10,94	100
1978/79	56,55	30,51	12,94	100

**Sumber:** Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Surabaya.  
 Diolah penulis.



perkembangan tingkat bunga baik untuk Giro, Deposito maupun tabungan yang menunjukkan suatu kecenderungan yang semakin menurun, dapat dikatakan bahwa hasrat masyarakat untuk menabung tidak lagi tergantung daripada tingkat suku bunga.

Pada tabel 11 halaman 62 dapat dilihat perkembangan tingkat suku bunga untuk Deposito berjangka yang menunjukkan suatu kecenderungan perkembangan tingkat suku bunga yang semakin menurun, bahkan ada beberapa Deposito berjangka yang dihapuskan tingkat suku bunganya. Seperti untuk Deposito berjangka kurang dari 3 bulan semula diberikan perangsang sebesar 6 % setahun sebagai bunga simpanan, sejak tanggal 1 Januari 1978 besarnya tingkat suku bunganya dihapus dengan catatan diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing bank pelaksana. Demikian juga dengan Deposito berjangka 3 bulan ke atas. Untuk Deposito berjangka 18 bulan yang semula diberikan bunga sebesar 24 % kemudian diturunkan menjadi 21 %, bahkan sejak tanggal 13 Januari 1977 dihapuskan, sedangkan untuk Deposito berjangka 24 bulan yang semula diberikan bunga sebesar 30 % setahun secara bertahap semakin diturunkan tingkat suku bunganya. Ketentuan terakhir untuk Deposito berjangka waktu 24 bulan jumlah simpanan sampai dengan Rp.2,5 juta pertama diberikan bunga sebesar 15 % setahun, kelebihannya diberikan bunga sebesar 12 % setahun.

Melihat perkembangan tingkat suku bunga tersebut da-

TABEL 11

## PERKEMBANGAN TINGKAT BUNGA DEPOSITO BERJANGKA TAHUN 1973-1978

Jangka waktu	12-4-1974	9-4-1974	28-12-1974	13-1-1977	1-1-1978
Kurang dari :					
3 bulan	6 %	6 %	6 %	3 %	- 2)
6 bulan	9 %	9 %	9 %	6 %	- 2)
9 bulan	12 %	12 %	12 %	9 %	6 %
12 bulan	15 %	15 %	15 %	12 %	9 %
18 bulan	-	24 %	21 %	11)	-
24 bulan	-	30 %	24 %	18 %	15 % dan 12 % 3)

Sumber: Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Surabaya.

Catatan: 1) Sejak 1977 Deposito berjangka 18 bulan dihapuskan.

2) Ditetapkan oleh masing-masing bank pelaksana.

3) Untuk jumlah simpanan sampai dengan Rp.2,5 juta bunganya 15%/tahun. Kelebihannya simpanan di atas Rp.2,5 juta bunganya 12%/tahun.

pat disimpulkan bahwa kebijaksanaan tingkat suku bunga cenderung untuk diturunkan. Sebaliknya dengan memperhatikan perkembangan jumlah dana perbankan yang menunjukkan kecenderungan semakin meningkat jumlahnya, penulis berpendapat bahwa hubungan antara tingkat suku bunga dengan hasrat untuk menabung memperlihatkan elastisitas yang tidak sempurna. Tepatnya hasrat untuk menabung tidak tergantung pada tingkat suku bunga.

Tingkat suku bunga untuk Tabanas yang semula ditentukan besarnya 18 % setahun dan untuk Taska sebesar 15 % setahun pada akhirnya hanya diberikan 15 % untuk Tabanas dengan jumlah simpanan sampai dengan Rp.200.000,- pertama, dan 6 % untuk simpanan di atas Rp.200.000,- sedangkan untuk Taska hanya diberikan bunga sebesar 9 % setahun.

Hasrat menabung masyarakat yang semakin meningkat tersebut seyogyanya diimbangi dengan penyaluran dana untuk kegiatan pembangunan.

Karena efek moneter dengan naiknya hasrat untuk menabung tersebut akan mengakibatkan berkurangnya uang di dalam peredaran. Efek yang demikian itu dapat mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat yang selanjutnya akan berpengaruh pada kelesuan kegiatan usaha.

Sebaliknya apabila tabungan yang jumlahnya semakin menanjak tersebut diimbangi dengan penyaluran dana perbankan untuk kegiatan investasi (pembangunan), maka arus uang di dalam masyarakat akan dapat bertambah kembali. Kegoncang-



an usaha tidak akan dialami dengan demikian stabilisasi masih dapat dipertahankan, bahkan memberikan arah pada akselerasi pembangunan daerah.

## 2. Peranan Dana Perbankan Terhadap Penchimpunan Dana Pembangunan Regional Jawa Timur

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang perimbangan antara jumlah dana yang dihimpun oleh Lembaga Perbankan di Jawa Timur dengan jumlah seluruh dana pembangunan regional di Jawa Timur, maka analisa yang berikut ini akan dikemukakan gambaran tersebut di atas.

Menurut angka-angka yang terdapat pada tabel 12 halaman 65 dapat diketahui bahwa dari ketiga sumber dana perbankan di Jawa Timur, Giro memegang peranan yang paling besar. Pada tahun pertama PELITA II Giro dapat memberikan sumbangan sebesar 36,94 % dari seluruh dana pembangunan di Jawa Timur sedangkan Deposito dan Tabungan masing-masing mempunyai peranan sebesar 18,35 % dan 4,19 %.

Pada tahun kedua PELITA II Giro mempunyai peranan pada tingkat 25,31 % sedangkan Deposito sebesar 17,21 % dan Tabungan sebesar 3,75 % dari seluruh jumlah dana pembangunan yang terhimpun.

Tahun 1976/1977 Giro mempunyai peranan sebesar 25,81 %, Deposito memegang peranan pada tingkat 21,58 % sedangkan Tabungan mempunyai peranan pada tingkat 5,44 % dari seluruh dana pembangunan daerah di Jawa Timur yang dapat dihimpun.

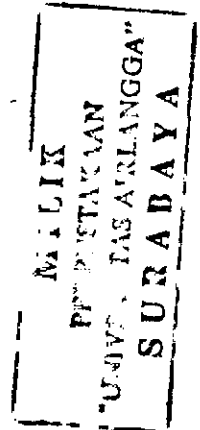
TABEL 12

PERANAN DANA PERBANKAN TERHADAP DANA PEMBANGUNAN DI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR MENURUT SUMBER DANA PERBANKAN TAHUN 1974/1975 SAMPAI DENGAN TAHUN  
1978/1979

(Dalam jutaan rupiah, persentase merupakan perbandingan antara Sumber  
Dana Pembangunan dengan Dana Perbankan)

No.	Tahun	Dana Pembangunan	Giro		Deposito		Tabungan	
			Rupiah	% terhadap dana pem- angunan	Rupiah	% terhadap dana pem- angunan	Rupiah	% terhadap sumber da- na pembang.
1.	1974/75	125.176	46.245	36,94	22.966	18,35	5.244	4,19
2.	1975/76	215.051	54.423	25,31	37.002	17,21	8.056	3,75
3.	1976/77	278.703	71.922	25,81	60.152	21,58	15.153	5,44
4.	1977/78	335.632	89.966	26,80	60.988	18,17	18.544	5,53
5.	1978/79	374.665	112.065	29,91	60.469	16,14	25.646	6,85

Sumber: Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Surabaya.  
BAPPEDA Daerah Tingkat I Jawa Timur.  
Diolah penulis.



Pada tahun 1977/1978 Giro mempunyai peranan pada tingkat 26,80 % sedangkan Deposito dan Tabungan masing-masing mempunyai peranan sebesar 18,17 % dan 5,53 % dari seluruh jumlah dana pembangunan yang dapat dihimpun.

Pada akhir tahun PELITA II Giro mempunyai peranan pada tingkat sebesar 29,91 % sedangkan Deposito dan Tabungan masing-masing mempunyai peranan sebesar 16,14 % dan 6,85%. Melihat perkembangannya, peranan sumber dana perbankan terhadap dana pembangunan mengalami penurunan kecuali sumber dana perbankan dari Tabungan mengalami peningkatan kecuali pada tahun 1975/1976 mengalami penurunan.

Dalam kenyataannya jumlah secara kuantitatif yang dapat dihimpun terus mengalami pertambahan.

Sumber dana perbankan yang berasal dari Giro di mana pada tahun pertama PELITA II berjumlah Rp.46.245 juta pada akhir tahun PELITA II meningkat menjadi Rp.112.065 juta. Sumber dana pembangunan yang berasal dari Deposito pada awal tahun PELITA II berjumlah Rp.22.966 juta pada akhir PELITA II meningkat menjadi Rp.604.469 juta. Sedangkan sumber yang berasal dari tabungan meningkat dari Rp.5.244 juta pada awal tahun PELITA II menjadi Rp.25.646 juta pada akhir tahun PELITA II.

### 3. Peranan Realisasi Kredit Perbankan Terhadap Pembangunan Regional Jawa Timur

Dengan memperhatikan angka-angka yang diperlihatkan pada tabel 13 halaman 68 dapat diperoleh gambaran yang lebih riil tentang peranan realisasi kredit perbankan di dalam menunjang pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pada tahun pertama PELITA II pihak Lembaga Perbankan dapat menyalurkan kredit sebesar Rp.166.101 juta, di mana pada tahun yang sama investasi pembangunan berjumlah sebesar Rp.314.762 juta berarti Lembaga Perbankan mempunyai peranan sebesar 52,77 %.

Pada tahun kedua PELITA II jumlah investasi pembangunan berjumlah Rp.456.521 juta sedangkan kredit yang disalurkan pihak Lembaga Perbankan berjumlah Rp.232.842 juta berarti Lembaga Perbankan mempunyai peranan sebesar 51,10 %.

Tahun ketiga PELITA II kredit yang dapat disalurkan sebesar Rp.300.358 juta sedangkan investasi pembangunan yang terhimpun sebesar Rp.525.200 juta berarti Lembaga Perbankan mempunyai peranan sebesar 28,03 %.

Tahun keempat PELITA II investasi pembangunan yang dapat dihimpun sebesar Rp.569.129 juta sedangkan kredit yang dapat disalurkan pada tahun yang sama sebesar Rp.364.936 juta sehingga Lembaga Perbankan mempunyai peranan 64,12 %.

Pada akhir tahun PELITA II kredit perbankan yang dapat disalurkan berjumlah sebesar Rp.456.376 juta, investasi pem-

**TABEL 13**  
**PERIMBANGAN ANTARA INVESTASI PEMBANGUNAN REGIONAL DENGAN REALISASI**  
**KREDIT PERBANKAN DI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**  
**TAHUN 1974/1975 SAMPAI DENGAN 1978/1979**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

No.	Tahun	Investasi Pembangunan	Realisasi kredit Perbankan	Peranan realisasi kredit perbankan terhadap Dana Pembangunan (%)
1.	1974/1975	314.762	166.101	52,77
2.	1975/1976	456.521	232.842	51,10
3.	1976/1977	525.200	300.358	28,03
4.	1977/1978	569.129	364.936	64,12
5.	1978/1979	1.308.456	456.376	34,88

**Sumber:** BAPPEDA Daerah Tingkat I Jawa Timur.  
 Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Surabaya.  
 Diolah penulis.

bangunan yang dihimpun sebesar Rp.1.308.456 juta berarti Lembaga Perbankan berperan pada tingkat 34,88 %.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peranan realisasi kredit perbankan terhadap investasi Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur selama pelaksanaan PELITA II mengalami penurunan yakni dari 52,77 % menjadi 34,88 %. Turunnya peranan realisasi kredit perbankan terhadap investasi pembangunan tersebut di atas bukan diakibatkan karena turunnya jumlah kredit yang disalurkan, akan tetapi dikarenakan jumlah investasi pembangunan yang melonjak dua kali lipat dari kondisi semula. Kalau investasi pembangunan yang pada tahun 1977/1978 berjumlah Rp.596.129 juta ternyata pada tahun 1978/1979 jumlahnya menjadi Rp.1.308.456 juta sedangkan realisasi kredit perbankan hanya mengalami peningkatan dari Rp.364.936 juta menjadi Rp.456.376 juta pada tahun yang sama.

Sebaliknya kondisi sebelumnya ternyata peranan realisasi kredit perbankan terhadap investasi pembangunan regional Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang menggembarakan. Dengan peranan yang semula mencapai tingkat sebesar 52,77 % pada awal tahun PELITA II berfluktuasi/naik turun sehingga mencapai tingkat sebesar 64,12 % pada tahun keempat PELITA II.

## B A B V

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hipotesa kerja terbukti bahwa apabila pelayanan pihak Lembaga Perbankan terhadap masyarakat dapat lebih ditingkatkan, maka peranan dana pembangunan yang dihimpun dari dana perbankan meningkat.

1. Dana Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur selama FELITA II yang dapat dihimpun berjumlah Rp.1.329,227 milyar, di mana dari jumlah tersebut sumbangan dari sumber Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp.604,055 milyar, dari sumber Tabungan Pemerintah sebesar Rp.36,331 milyar sedang sisanya sebesar Rp.688,841 milyar berasal dari Dana Perbankan.
2. Sumber investasi pembangunan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terdiri dari sumber Pemerintah dan non Pemerintah.

Selama pelaksanaan FELITA I Investasi Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berjumlah Rp.414,595 milyar di mana Rp.113,673 milyar berasal dari sumber Investasi Pemerintah sedangkan sisanya sebesar Rp.300,922 milyar berasal dari sumber non Pemerintah. Ini berarti pihak non Pemerintah mempunyai peranan sebesar 72,58 %.

Dalam pelaksanaan PELITA II Investasi Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berjumlah Rp.2.573,5 milyar di mana dari jumlah tersebut yang berasal dari sumber non Pemerintah berjumlah sebesar Rp.1.964,3 milyar dan jumlah sebesar Rp.609,2 milyar berasal dari sumber Pemerintah. Ini berarti pihak non Pemerintah mempunyai peranan sebesar 76,33 %.

Di dalam pelaksanaan PELITA III Investasi Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur diharapkan sumber non Pemerintah mempunyai peranan 60 % sedang yang 40 % berasal dari sumber Pemerintah.

3. Selama pelaksanaan PELITA II pihak Lembaga Perbankan telah dapat meningkatkan penyaluran kredit dari Rp.166.101 juta menjadi Rp.456.076 juta atau rata-rata pertumbuhan sebesar 28,73 % setiap tahun.
4. Pihak Lembaga Perbankan selama pelaksanaan PELITA II dapat meningkatkan dana asal masyarakat dari jumlah sebesar Rp.74.455 juta pada tahun pertama PELITA II menjadi jumlah sebesar Rp.198.180 juta pada akhir tahun pelaksanaan PELITA II atau rata-rata pertumbuhan sebesar 27,73 % setiap tahun.
5. Dari ketiga sumber dana perbankan yang mempunyai peranan paling besar terhadap dana pembangunan selama



PELITA II adalah Giro kemudian Deposito dan yang terkecil memberikan sumbangannya adalah Tabungan.

6. Seluruh kebutuhan investasi pembangunan daerah Jawa Timur selama PELITA II berjumlah sebesar Rp.3.174,068 milyar sedangkan dana pembangunan yang terhimpun selama waktu yang sama berjumlah sebesar Rp.1.329,227 milyar. Berarti selama PELITA II di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur masih membutuhkan dana pembangunan untuk keperluan investasi pembangunan sebesar Rp.1.944,841 milyar atau 41,88 % kebutuhan investasi pembangunan daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibiayai sumber dalam negeri.

## 2. Saran

1. Makin besarnya Dana Perbankan yang dapat dihimpun oleh Lembaga Perbankan berarti makin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak Lembaga Perbankan. Maka hendaknya Bank Indonesia lebih memperketat penilaiannya terhadap calon-calon pemimpin ataupun pemimpin-pemimpin yang sudah ada, untuk menghindari adanya manipulasi.
2. Di dalam pelaksanaan Investasi Pembangunan di dalam PELITA III seyogyanya pihak non Pemerintah mempunyai peranan lebih dari pelaksanaan PELITA II atau sekurang-kurangnya sama dengan pelaksanaan PELITA I.

3. Mengingat pentingnya peranan bank, baik bank Pemerintah maupun bank swasta di dalam perekonomian maka diharapkan Bank Indonesia menaruh perhatian yang lebih besar dalam bidang-bidang administrasi, organisasi dan prasarana Bank-bank tersebut di atas, agar supaya peranan bank terhadap perekonomian dapat lebih besar lagi.
4. Dengan meningkatnya sumber dana asal masyarakat yang dapat dihimpun pihak Lembaga Perbankan seyogyanya penyalurannya diarahkan pada kegiatan pembangunan yang bersifat produktif.
5. Untuk meningkatkan sumbangan sumber dana perbankan terhadap dana pembangunan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur diharapkan pelayanan pihak Lembaga Perbankan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan antara lain :
  - pemberian suku bunga yang menarik
  - perkembangan deposito berjangka lebih dari 6 bulan.
  - kemudahan mendapatkan rekening giro.
6. Untuk memenuhi kebutuhan investasi pembangunan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu adanya peningkatan sumber-sumber dana pembangunan seperti pe-

ningkatan Bantuan Pemerintah Pusat, Peningkatan Tabungan Pemerintah selain juga peningkatan dana yang dihimpun oleh Lembaga Perbankan.



## DAFTAR BUKU

- Bank Indonesia, Laporan Tahun Pembukuan 1978/1979 Bank Indonesia, Jakarta, 1980.
- Departemen Penerangan R.I., Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75-1978/79, Departemen Penerangan R.I. Jakarta, 1974.
- \_\_\_\_\_ , Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80 - 1983/84, Departemen Penerangan R.I., Jakarta, Buku I, (t.th.).
- Glassburner Bruce, Aditiawan Chandra, Teori dan Kebijakan-  
naan Ekonomi Makro. Cetakan pertama, LPJES, Jakarta,  
Maret 1979.
- Kurihara, Kenneth K., Monetary Theory And Public Policy,  
terjemahan Binakawan Study Club, Binakawan Study Club  
(t.th.).
- Meier, Gerald M. and Baldwin Robert E., Economic Develop-  
ment. Cetakan ke-5, John Wiley and Sons, Inc., New  
York, Charles E. Tuttle Company, Tokyo, Modern Asia  
Edition, 1964.
- Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur,  
Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga Di Daerah Pro-  
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 1979/80-1983/84, Pe-  
merintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur,  
Surabaya, Buku I (t.th.).
- Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Borta Gorat, Medan,  
(t.th.).
- Simorangkir, O.P., Dasar-dasar dan Mekanisme PERBANKAN. Ce-  
takan pertama, Yagrat, Jakarta, 1979.
- Sumitro Djojohadikusumo, Ekonomi Pembangunan, P.T. Pempa-  
ngunan, Jakarta, 1955.
- Team Evaluasi Pembangunan di Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Jawa Timur (BAPPEDA), Jawa Timur Membangun, Eka Dasa  
Warsa 1969-1979, Team Evaluasi Pembangunan di Daerah  
Tingkat I Jawa Timur (BAPPEDA), Surabaya, tahun 1980.
- Tjipto Adi Nugroho R., Perbankan Masalah Permodalan Dana  
dan Potensi, PT. Pratnya Iaramita, Jakarta, 1974.

Undang-Undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan dan Undang-Undang No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, diperbanyak oleh Biro Penerbitan Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 1976.

Wood Oliver G.Jr., Commercial Banking, D.van Nostrand Company, New York, (t.th.).

